



Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RENJA TAHUN 2026

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN**



(0321) 390211



dprkp2.mojokertokab.go.id



KATA PENGANTAR

Penyusunan Kerja (Renja) Tahun 2026, Merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 tidak terlepas dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto 2025-2029. Dalam Renja Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 ini terdapat 7 (Tujuh) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub-Kegiatan.

Harapan kami semoga Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub-kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, serta pagu indikatif Tahun 2026 dan prakiraan maju kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 mendatang.

Mojokerto, Juli 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. RACHMAT SUHARYONO

Pembina Utama Muda

NIP.19731120 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD.....	20
2.4. Review Terhadap Awal RKPD.....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan.....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	38
3.3. Program dan Kegiatan.....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	52
BAB V PENUTUP.....	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada renstra OPD serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Renstra OPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan awal OPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas awal OPD yang disusun ke dalam Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Renstra OPD.

Renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh DPRKP2, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD

berdasarkan usulan program dan kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah ;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
- m. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tatakerja Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- f. Memberikan acuan bagi OPD dalam menjangkau tujuan / indikator tujuan OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SK OPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, Analisis Kinerja OPD dan Isu-isu penting Tugas dan Fungsi OPD serta Review terhadap Ranwal Renja RKOPD dan Kajian usulan Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan.

BAB III.Tujuan, sasaran, Perangkat Daerah

Berisi ulasan terhadap Kebijakan Nasional tujuan dan sasaran OPD serta faktor-faktor yang menjadikan bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 secara rinci sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pencapaian kinerja program pelayanan kesekretariatan adalah Tersedianya data sebagai bahan penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan dan lancarnya aktifitas pelayanan administrasi kantor dan pelaksanaan tugas.

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

.

Sub-Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub- Kegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub- Kegiatan:

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan / Material
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Sub- Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub- Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Pengembangan Perumahan

Pencapaian kinerja adalah Persentase kualitas sarana prasarana permukiman layak huni.

Kegiatan :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub- Kegiatan:

- a. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
- b. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota

2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota

Sub- Kegiatan:

- a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

3) Program Kawasan Permukiman

Pencapaian kinerja adalah Persentase kualitas sarana prasarana permukiman layak huni.

Kegiatan :

1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub- Kegiatan:

- a. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub- Kegiatan:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
- b. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
- c. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

4) Program Peningkatan Parasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

Pencapaian Kinerja Adalah Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan

Kegiatan :

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub-Kegiatan :

- a. Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- b. Verifikasi Penyerahan PSU Permukiman dan Pengembang

5) Program Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Pencapaian Kinerja Adalah Persentase Redistribusi dan Ganti Rugi Tanah yang Tercapai

Kegiatan :

1. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

Sub-Kegiatan :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota

6) Program Penatagunaan Tanah

Pencapaian Kinerja Adalah Persentase Penatagunaan tanah yang baik

Kegiatan :

2. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Kabupaten/Kota

Sub-Kegiatan :

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

7) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pencapaian Kinerja Adalah Persentase pelanggaran lalu lintas dan kelancaran arus lalu lintas.

Kegiatan :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub-Kegiatan :

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub-Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3. Pengujian Kendaraan Bermotor

Sub-Kegiatan :

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub-Kegiatan :

- a. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota
- b. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota
- c. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Tabel 2.1
(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRA M (RENSTRA) 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGR AM DAN KEGIAT AN (RENJA TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA TAHUN (n-2)	REALISASI RENJA TAHUN (n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	81,75	77,27	78,6	78,8	100,25	81	81,6	100,74
1	04	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	100%	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,80%	80	80	92,3	115,38	94,7	94,7	99,89
1	04	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	80%	100	100	100	100,00	100	100	125,00
1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	90%	100	100	100	100,00	100	100	111,11
1	04	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	80%	100	100	100	100,00	100	100	125,00

1	04	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80%	80	100	100	100,00	80	80	100,00
1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana	80%	80	100	100	100,00	100	100	125,00
1	04	02	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	80%	0	0	0	0,00	80	80	100,00
1	04	02	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang Terlaksana	80%	100	100	100	100,00	100	100	125,00
1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	23,84%	100	3,18	19,27	605,97	19,82	23,64	99,16
1	04	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Tertangani	23,84%	100	100	100	100,00	2,22	7	29,36
1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Layak Huni		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	04	04	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Total pencegahan rumah terjadi kumuh		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Rumah yang Terfasilitasi PSU dalam 1 (Satu) Kabupaten	75%	100	100	100	100,00	36,74	36,74	48,99
1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan yang Terlaksana	75%	100	100	100	100,00	100	100	133,33
2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah	100%	100	0	0	0,00	100	100	100,00
2	10	10	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Sertifikasi Tanah sesuai peruntukan	100%	100	0	0	0,00	100	100	100,00
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum	65,74%	100	100	100	100,00	60,7	60,7	92,33

				LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Layak Jalan								
2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya perlengkapan jalan layak	80%	100	95	95	100,00	100	100	125,00
2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir memadai	80%	100	100	100	100,00	100	100	125,00
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terselenggaranya pengujian kendaraan bermotor	100%	100	100	100	100,00	100	83,69	83,69
2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	80%	100	100	94,27	94,27	100	100	125,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Memuat kajian terhadap kondisi pelayanan teknis OPD, organisasi dalam OPD, tugas dan fungsi pelayanan OPD, pedoman pelaksanaan pelayanan pada OPD, keterkaitan program Pemerintah Provinsi dengan OPD, serta analisa capaian pendapatan asli daerah yang berisi tentang target pendapatan asli daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang retribusi parkir berlangganan.

Target Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto selama periode Perubahan Renstra 2025-2029 bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2.2
(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra (SPM) SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase lingkungan peningkatan kualitas lingkungan perumahan	-	-	80	80	80		50	-	80	80	-
2.	Persentase Kualitas Sarana Prasarana Permukiman Layak Huni	-	-	95	95	95		87	-	95	95	-
3.	Persentase fasilitas sarana prasarana jalan yang terpasang layak fungsi	-	-	87	87	87		70	-	87	87	-
4.	Persentase Pelanggaran Lalu Lintas dan Kelancaran Lalu Lintas	-	-	100	100	100		100	-	100	100	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis terkait dengan pelayanan OPD

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolak ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2029.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan di evaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan OPD. Keberhasilan tujuan dan sasaran OPD yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto akan berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran Kabupaten Mojokerto.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah dipengaruhi oleh faktor Lingkungan strategis. Adapun lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan (strenghts) (S) dan kelemahan (weakness) (W) dan lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang (opportunity) (O) dan tantangan (threats) (T).

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menetapkan factor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan.

Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan (key succes factors) yang merupakan faktor penentu yang dipandang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan sasarandengan menerapkan metode analisis SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities dan threats). Implementasi metode ini akan membantu OPD untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Hal yang paling buruk akan terjadi, apabila OPD mengembangkan kelemahnya karena ketidakmampuannya untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi. Identifikasi yang dirumuskan oleh Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

a. Permasalahan :

1. Belum optimalnya kinerja aparat sebagai akibat masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan ketrampilan mengenai aspek teknis dan operasional
2. Keterbatasan wewenang dalam melakukan pengendalian dan penegakan hukum.
3. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang berkelanjutan untuk menunjang SDM yang berkualitas.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan operasional.
6. Masih terbatasnya kemampuan manajerial dari sebagian besar staf mengenai aspek operasional kegiatan.
7. Masih lemahnya kepastian hukum terutama aspek kepegawaian (reward and punishment).
8. Masih kurang mantapnya kinerja lembaga akibat tumpang tindihnya tupoksi antar instansi.
9. Masih kurangnya tenaga dengan kualifikasi pendidikan yang memadai dan kompatibel.
10. Masih kurangnya sumber dana untuk operasional kegiatan pada masing-masing bidang.
11. Belum optimalnya pemanfaatan sarana yang dimiliki dalam rangka menunjang kegiatan dinas.
12. Masih kurang sinergisnya diantara masing-masing sub dinas dalam hal pelaksanaan kegiatan.
13. Letak kantor jauh dari pusat pemerintahan.

b. Hambatan

1. Terbatasnya anggaran operasional
2. Letak kantor terlalu jauh dengan pusat pemerintahan
3. Terbatasnya sarana prasarana oprasional
4. Terbatasnya tenaga operasional teknis

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional

Dalam mencapai sasaran dan prioritas nasional pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan belum bisa di optimalkan dikarenakan semakin banyaknya jumlah penduduk dan rumah tangga baru yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni, adapun semakin berkurangnya transportasi umum membuat menurunnya jumlah penumpang sehingga secara factual mengurangi/menggangu fungsi terminal.

Pengembangan sector/ komoditas/kegiatan unggulan daerah berpengaruh kepada meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik pribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas serta tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas yang kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.

4. Formulasi isu-isu penting

- a. Pemerataan Rumah Layak Huni bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mojokerto
- b. Peningkatan fasilitas sanitasi dan fasilitas umum bagi kawasan kumuh
- c. Semakin banyaknya jumlah penduduk dan rumah tangga baru yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni.

- d. Semakin berkembangnya industri properti.
- e. Semakin berkurangnya transportasi umum membuat menurunnya jumlah penumpang sehingga secara faktual mengurangi/mengganggu fungsi terminal.
- f. Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik pribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas.
- g. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.
- h. Kabupaten Mojokerto merupakan Wilayah Gerbang Kertasusila dan dekat dengan ibukota provinsi sehingga menjadi wilayah dengan tingkat lalulintas kendaraan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan potensi kerawanan lalulintas.

2.4. Review Terhadap Awal RKPD

1. Perbandingan Antara Ranwal RKPD Dengan Hasil Analisis Kebutuhan

Membandingkan antara Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Perumusan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Berkaitan dengan hal tersebut maka ada beberapa usulan program dan kegiatan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto yang tidak sesuai dengan dari Ranwal RKPD. Dapat diperhatikan pada Tabel T-C 33 Rumus rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2026.

2. penjelasan Alasan Proses dilakukan

Tupoksi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. Maka sesuai dengan Instruksi Permendagri 86 tahun 2017 dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Perlu memperhatikan Tabel 4.2 Persandingan Prioritas Kabupaten Mojokerto dengan Nasional pada Ranwal RKPD Tahun 2026. Peralihan tersebut bertujuan untuk mencapai target kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

3. Penjelasan Temuan Dan Catatan Penting Terhadap Perbedaan Dengan Ranwal RKPD Review Terhadap Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto akan di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Awal RKPD Tahun Anggaran 2026
Kabupaten Mojokerto

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mojokerto	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	81 (A)	69.886.601.672	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mojokerto	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	81 (A)	9.728.417.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	100%	13.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	100%	15.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6.750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	7.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	80%	8.664.220.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	80%	8.062.017.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	8.664.220.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	8.062.017.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	57.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	90.000.000	
	Pengadaan Pakaian	Kab.	Jumlah Paket Pakaian	70 Paket	57.600.000	Pengadaan Pakaian	Kab.	Jumlah Paket	72 Paket		

	Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Mojokerto	Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Mojokerto	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		90.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	90%	412.431.672	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	90%	504.400.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	75.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	22.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	262.931.672	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	299.400.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	27.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	27.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	63.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	60.405.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	80%	615.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.050.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	
	Penyediaan Jasa	Kab.	Jumlah Laporan	12	355.000.000	Penyediaan Jasa	Kab.	Jumlah Laporan	12 Laporan		

	Pelayanan Umum Kantor	Mojokerto	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Pelayanan Umum Kantor	Mojokerto	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		365.800.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80%	333.850.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80%	441.200.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Bangunan	150.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Bangunan	316.200.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	33.850.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	25.000.000	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Mojokerto	Persentase Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana	80%	500.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Mojokerto	Persentase Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana	80%	500.000.000	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Persentase Terpenuhinya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	80	150.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Persentase Terpenuhinya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	80	200.000.000	
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	50.000.000	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi	1 Dokumen	200.000.000	

	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Perumahan Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang Terlaksana	100%	350.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang Terlaksana	80	300.000.000	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Mojokerto	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	200.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Mojokerto	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	300.000.000	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Mojokerto	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	150.000.000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Mojokerto	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	300.000.000	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Mojokerto	Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	74	7.185.993.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Mojokerto	Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	74	2.710.000.000	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Mojokerto	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Tertangani	74	43.957.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Mojokerto	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Tertangani	74	50.000.000	
	Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kab. Mojokerto	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	10 Kelompok	43.957.000	Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kab. Mojokerto	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	10 Kelompok	50.000.000	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Mojokerto	Persentase Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Bawah 10 Ha	74	7.142.036.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Mojokerto	Persentase Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Bawah 10 Ha	74	2.660.000.000	
	Perbaikan Rumah Tidak	Kab.	Jumlah Rumah Tidak	9 Unit	410.000.000	Pelaksanaan	Kab.	Luas Kawasan	1,85 Ha		

	Layak Huni	Mojokerto	Layak Huni yang Diperbaiki			Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Mojokerto	Permukiman Kumuh yang Diremajakan		700.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Lap	661.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Lap	160.000.000	
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Mojokerto	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	7 Ha	310.000.000	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Mojokerto	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1,85 Ha	700.000.000	
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Mojokerto	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1 Ha	5.761.036.000	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Mojokerto	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1,85 Ha	700.000.000	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Mojokerto	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Layak Huni	6%	4.790.000.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Mojokerto	Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	74	2.710.000.000	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Total pencegahan rumah terjadi kumuh	156 unit	4.790.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Total pencegahan rumah terjadi kumuh	156 unit	50.000.000	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Mojokerto	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	156 unit	4.790.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Mojokerto	Jumlah Kelompok Swadaya MasyJumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh arakat di	156 unit	50.000.000	

								Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina			
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Mojokerto	Persentase Rumah yang Terfasilitasi PSU dalam 1 (Satu) Kabupaten	36,84%	704.175.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Mojokerto	Persentase Rumah yang Terfasilitasi PSU dalam 1 (Satu) Kabupaten	75	5.300.000.000	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Mojokerto	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan yang Terlaksana	36,84%	704.175.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Mojokerto	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan yang Terlaksana	75	1.300.000.000	
	Perbaikan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untu menunjang Fungsi Hunia	Kab. Mojokerto	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	2 Lokasi	654.175.000	Perbaikan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untu menunjang Fungsi Hunia	Kab. Mojokerto	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	2 Lokasi	4.000.000.000	
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perrumahan dari Pengembang	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	20 Laporan	50.000.000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perrumahan dari Pengembang	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	200.000.000	
6	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Mojokerto	Persentase penatagunaan tanah	100	101.270.000.000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Mojokerto	Persentase penatagunaan tanah	100	30.000.000	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Sertifikasi Tanah sesuai peruntukan	100	101.270.000.000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Sertifikasi Tanah sesuai peruntukan	2	30.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	101.270.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	30.000.000	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Mojokerto	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	80	3.862.800.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Mojokerto	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	80	7.315.500.000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Kab. Mojokerto	Persentase tersedianya perlengkapan jalan	80	1.962.800.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Kab. Mojokerto	Persentase tersedianya		2.700.000.000	

	Jalan Kabupaten/Kota	o	layak			Jalan Kabupaten/Kota	o	perlengkapan jalan layak	80		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	782.800.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	200.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Mojokerto	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10 Unit	100.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Mojokerto	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10 Unit	50.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Mojokerto	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12000 Unit	1.080.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Mojokerto	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12000 Unit	1.750.000.000	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Mojokerto	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir memadai	90%	600.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Mojokerto	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir memadai	90%	1.220.500.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	600.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1.220.500.000	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Mojokerto	Persentase terselenggaranya pengujian kendaraan bermotor	100	558.500.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Mojokerto	Persentase terselenggaranya pengujian kendaraan bermotor	100	875.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	1 Unit	200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	1 unit	400.000.000	

	Bermotor		Bermotor yang Tersedia			Bermotor		Kendaraan Bermotor yang Tersedia			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Mojokerto	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Mojokerto	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 orang		
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14000 Unit	200.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14000 Unit	75.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	58.500.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	75.000.000	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	80	741.500.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	80	2.520.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	521.500.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	680.000.000	
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kab. Mojokerto	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	10 unit	100.000.000	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kab. Mojokerto	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	10 unit	25.000.000	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	20.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	4 Laporan	25.000.000	

								Kabupaten/Kota			
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Mojokerto	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	100.000.000	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Mojokerto	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	310.000.000	
	JUMLAH				188.199.569.672					28.598.917.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait Langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Tabel 2.4

(Tabel T-C. 34 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Arjuna dan Jalan Krisna Perumahan Japan Raya Kec. Sooko, Kab. Mojokerto	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	2 Lokasi	Pokir Dewan
2					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Terkait dengan tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam urusan Perumahan dan Permukiman dengan kebijakan Nasional sebagaimana dimandat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 bahwa Pembangunan dan Pengembangan Kawasan perkotaan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan. Upaya pencapaian target selaras Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2022-2026 yang mengamanatkan bebas kumuh dan 100 persen akses sanitasi yang layak pada akhir 2026. Indikator 100% yang dimaksud ialah, Indonesia bisa memenuhi 85% Standart Pelayanan Minum (SPM) dan 15% memenuhi kebutuhan dasar. Dalam memenuhi SPM di sektor air minum setidaknya setiap warga bisa mendapatkan akses sebanyak 60 liter/orang/detik. Adanya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 70% Target universal access pada 2026 mendatang bukanlah merupakan hal mudah yang bisa dicapai, pasalnya dalam memenuhi target ini perlu lompatan besar yang dilakukan. Terlebih, hingga kini capaian akses air minum aman dan sanitasi layak Indonesia masih kurang optimal.

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang

melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang. Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi.

TABEL 3.1
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

SASARAN		PRIORITAS			
		NASIONAL		KABUPATEN	
1.	Pembangunan Infrastruktur	1.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1.	Pengembangan Infrastruktur dan Ekonomi Wilayah
		a.	Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah	a.	Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah
		b.	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	b.	Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Bersinergi dengan AgroWisata dan UMKM dari hulu ke hilir
		c.	Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	c.	Percepatan perwujudan Kawasan Ekonomi Khusus
		d.	Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis	d.	Peningkatan nilai tambah industri, perdagangan dan

SASARAN		PRIORITAS	
		NASIONAL	KABUPATEN
		kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah	ekonomi kreatif melalui dengan memanfaatkan teknologi digital (industri 4.0), melalui peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam pemasaran melalui e-commerce, dan peningkatan diversifikasi produk dan inovasi teknologi produksi
		e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata	e. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah

- a. Terpenuhinya kebutuhan MBR atas permukiman layak huni dan peningkatan konektivitas jaringan jalan

Sasaran Perangkat Daerah :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman layak huni
2. Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan sistem transportasi

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Program dan kegiatan di Tahun 2026 ini kami sesuaikan dengan Kerangka Logis Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan dasar Misi 7 Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto.

Program di usulan tahun 2026 yakni 7 (Tujuh) Program, 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan dan 40 (Empat Puluh) Sub-Kegiatan.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan.
 - Pemerataan Rumah Layak Huni bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mojokerto
 - Peningkatan fasilitas sanitasi dan fasilitas umum bagi kawasan kumuh
 - Semakin banyaknya jumlah penduduk dan rumah tangga baru yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni.
 - Semakin berkembangnya industri properti.
 - Semakin berkurangnya transportasi umum membuat menurunnya jumlah penumpang sehingga secara faktual mengurangi/menggangu fungsi terminal.
 - Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik pribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehinga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas.
 - Tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Jumlah Program dan Kegiatan pada DPRKP2 terdiri dari 7 (Tujuh) Program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Sub-Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Peningkatan Parasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
5. Program Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
6. Program Penatagunaan Tanah
7. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

b. Jumlah Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
8. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota
9. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
10. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
11. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

12. Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian
13. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
14. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
15. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
16. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
17. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
18. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
19. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

b. Jumlah Sub-Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Bahan/Material
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota
16. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
17. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
18. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
19. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
20. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
21. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
22. Verifikasi Penyerahan PSU Permukiman dan Pengembang
23. Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota
24. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
25. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
26. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
27. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
28. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
29. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

30. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
31. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
32. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
33. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota
34. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota
35. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

c. Total kebutuhan dana/ Pagu indikatif

Bagian ini menjelaskan tentang total kebutuhan dana dan pagu indikatif pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto yang dijelaskan pada tabel T-C 33 dibawah ini.

3. Rumusan program kegiatan yang tidak sesuai dengan ranwal RKPD

Bagian ini menjelaskan tentang rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto yang dijelaskan pada tabel T-C 33 dibawah ini.

4. Tabel renncana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel T-C 33

Bagian ini menjelaskan tentang rencana program dan kagiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Kabupaten Mojokerto berdasarkan hasil pengerjaan tabel T-C 33 dibawah ini.

Tabel 3.2
(Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumus Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Kab. Mojokerto	81,75 (A)	69.886.601.672	APBD		81 (A)	9.728.417.000
1	0	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	Kab. Mojokerto	1	13.500.000	APBD		1	15.000.000
1	0	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	3 Dokumen	6.750.000	APBD		3 Dokumen	7.500.000
1	0	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	5 Laporan	6.750.000	APBD		5 Laporan	7.500.000
1	0	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	80%	8.664.220.000	APBD		80%	8.062.017.000
1	0	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	75 Orang	8.664.220.000	APBD		75 Orang	8.062.017.000
1	0	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	Kab. Mojokerto	0,8	57.600.000	APBD		0,8	90.000.000

						Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan							
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mojokerto	70 Paket	57.600.000	APBD		72 Paket	90.000.000
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Kab. Mojokerto	90%	412.431.672	APBD		90%	504.400.000
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	10 Paket	50.000.000	APBD		10 Paket	75.000.000
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	10 Paket	22.500.000	APBD		12 Paket	40.000.000
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Paket	262.931.672	APBD		10 Paket	299.400.000
1	04	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Paket	27.000.000	APBD		10 Paket	27.000.000
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	12 Laporan	50.000.000	APBD		10 Laporan	63.000.000
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Kab. Mojokerto	80%	60.405.000.000	APBD		80%	615.800.000
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan	60.050.000.000	APBD		12 Laporan	250.000.000
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan	355.000.000	APBD		12 Laporan	365.800.000
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kab. Mojokerto	80%	333.850.000	APBD		80%	441.200.000

					Daerah								
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mojokerto	46 unit	150.000.000	APBD		10 Unit	100.000.000
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	3 Bangunan	150.000.000	APBD		3 Bangunan	316.200.000
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	10 Unit	33.850.000	APBD		10 Unit	25.000.000
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana	Kab. Mojokerto	80%	500.000.000	APBD		80%	500.000.000
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Kab. Mojokerto	80	150.000.000	APBD		80	200.000.000
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang Terlaksana	Kab. Mojokerto	80	350.000.000	APBD		80	300.000.000
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Mojokerto	5 Unit Rumah	200.000.000	APBD		2 Unit Rumah	300.000.000
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Mojokerto	3 Unit Rumah	150.000.000	APBD		2 Unit Rumah	300.000.000

1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	Kab. Mojokerto	74	7.185.993.000	APBD		74	2.710.000.000	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Tertangani	Kab. Mojokerto	74	43.957.000	APBD		74	50.000.000	
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kab. Mojokerto	10 Kelompok	43.957.000	APBD		10 Kelompok	50.000.000	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Bawah 10 Ha	Kab. Mojokerto	74	7.142.036.000	APBD		74	2.660.000.000	
1	04	03	2.03	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Mojokerto	9 Unit Rumah	410.000.000	APBD		80 unit rumah	1.800.000.000	
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Mojokerto	1 Lap	661.000.000	APBD		1 Lap	160.000.000	
1	04	03	2.03	009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Kab. Mojokerto	1,85 Ha	310.000.000	APBD		1,85 Ha	700.000.000	
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dipugar	Kab. Mojokerto	1,85 Ha	5.761.036.000	DAK-PPKT		1,85 Ha	700.000.000	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Layak Huni	Kab. Mojokerto	6%	4.790.000.000	APBD		74	2.710.000.000	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Total pencegahan rumah terjadi kumuh	Kab. Mojokerto	156 Unit	4.790.000.000	APBD		74	50.000.000	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Mojokerto	156 Unit	4.790.000.000	APBD		10 Kelompok	50.000.000	

					Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki							
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Rumah yang Terfasilitasi PSU dalam 1 (Satu) Kabupaten	Kab. Mojokerto	36,84%	704.175.000	APBD		75	5.300.000.000
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan yang Terlaksana	Kab. Mojokerto	36,84%	704.175.000	APBD		75	1.300.000.000
1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untu menunjang Fungsi Hunia	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	0	1 Lokasi	654.175.000			2 Lokasi	4.000.000.000
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perrmahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Kab. Mojokerto	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	200.000.000
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah	Kab. Mojokerto	100	101.270.000.000	APBD		100	30.000.000
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	2 Dopkumen	101.270.000.000	APBD		2	30.000.000
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Sertifikasi Tanah sesuai peruntukan	Kab. Mojokerto	2 Dokumen	101.270.000.000	APBD		2 Laporan	30.000.000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	Kab. Mojokerto	100%	3.862.800.000	APBD		80	7.315.500.000
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya perlengkapan jalan layak	Kab. Mojokerto	100%	1.962.800.000	APBD		80	2.700.000.000
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Mojokerto	194 unit	782.800.000	APBD		50 Unit	200.000.000
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Mojokerto	10 Unit	100.000.000	APBD		10 Unit	50.000.000

2	1 5	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Mojokerto	12000 Unit	1.080.000.000	APBD		12000 Unit	1.750.000.000	
2	1 5	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir memadai	Kab. Mojokerto	80	600.000.000	APBD		80	1.220.500.000	
2	1 5	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	600.000.000	APBD		1 Dokumen	1.220.500.000	
2	1 5	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terselenggaranya pengujian kendaraan bermotor	Kab. Mojokerto	100	558.500.000	APBD		100	875.000.000	
2	1 5	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Mojokerto	1 unit	200.000.000	APBD		14000 Unit	400.000.000	
2	1 5	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Mojokerto	20 orang	100.000.000	APBD		14000 Unit	400.000.000	
2	1 5	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Mojokerto	14000 unit	200.000.000	APBD		14000 Unit	400.000.000	
2	1 5	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab. Mojokerto	10 unit	58.500.000	APBD		9 Unit	75.000.000	
2	1 5	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kab. Mojokerto	80	741.500.000	APBD		80	2.520.000.000	

					Kabupaten/Kota								
2	1 5	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	4 Laporan	521.500.000	APBD		4 Laporan	680.000.000
2	1 5	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kab. Mojokerto	10 Unit	100.000.000	APBD		4 Laporan	25.000.000
2	1 5	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	4 Laporan	20.000.000	APBD		4 Laporan	25.000.000
2	1 5	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	400.000.000
					Total				188.199.569.672				28.598.917.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 188.199.589.672 - (Seratus delapan puluh delapan milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh Sembilan enam ratus tujuh puluh dua rupiah) adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Mojokerto

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	5	6	7
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	81,75 (A)	69.886.601.672	APBD
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	1	13.500.000	APBD
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.750.000	APBD
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6.750.000	APBD
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	80%	8.664.220.000	APBD
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	8.664.220.000	APBD
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	0,8	57.600.000	APBD

1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	57.600.000	APBD
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	90%	412.431.672	APBD
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	50.000.000	APBD
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	22.500.000	APBD
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	262.931.672	APBD
1	04	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	27.000.000	APBD
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	APBD
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	80%	60.405.000.000	APBD
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.050.000.000	APBD
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	355.000.000	APBD
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80%	333.850.000	APBD
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit	150.000.000	APBD
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Bangunan	150.000.000	APBD
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	33.850.000	APBD
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana	80%	500.000.000	APBD

1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	80	150.000.000	APBD
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	50.000.000	APBD
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	APBD
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang Terlaksana	80	350.000.000	APBD
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	200.000.000	APBD
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	150.000.000	APBD
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kumuh yang Tertangani	74	7.185.993.000	APBD
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Tertangani	74	43.957.000	APBD
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	10 Kelompok	43.957.000	APBD
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Bawah 10 Ha	74	7.142.036.000	APBD
1	04	03	2.03	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	9 Unit Rumah	410.000.000	APBD
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Lap	661.000.000	APBD
1	04	03	2.03	009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1,85 Ha	310.000.000	APBD
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dipugar	1,85 Ha	5.761.036.000	DAK-PPKT
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN	Persentase Kualitas Sarana dan	6%	4.790.000.000	APBD

					KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prasarana Permukiman Layak Huni			
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Total pencegahan rumah terjadi kumuh	156 Unit	4.790.000.000	APBD
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	156 Unit	4.790.000.000	APBD
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Rumah yang Terfasilitasi PSU dalam 1 (Satu) Kabupaten	36,84%	704.175.000	APBD
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan yang Terlaksana	36,84%	704.175.000	APBD
1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untu menunjang Fungsi Hunia	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi	654.175.000	
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	50.000.000	APBD
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah	100	101.270.000.000	APBD
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Dopkumen	101.270.000.000	APBD
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Sertifikasi Tanah sesuai peruntukan	2 Dokumen	101.270.000.000	APBD
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	100%	3.862.800.000	APBD
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya perlengkapan jalan layak	100%	1.962.800.000	APBD
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	194 unit	782.800.000	APBD
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10 Unit	100.000.000	APBD
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan	12000 Unit	1.080.000.000	APBD

2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terpelihara Persentase penerbitan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir memadai	80	600.000.000	APBD
2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	600.000.000	APBD
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terselenggaranya pengujian kendaraan bermotor	100	558.500.000	APBD
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit	200.000.000	APBD
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 orang	100.000.000	APBD
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14000 unit	200.000.000	APBD
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 unit	58.500.000	APBD
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	80	741.500.000	APBD
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	521.500.000	APBD
2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	10 Unit	100.000.000	APBD
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	20.000.000	APBD
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	100.000.000	APBD

					Total			188.199.569.672	
--	--	--	--	--	--------------	--	--	------------------------	--

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ada beberapa program yang mempunyai dana terbatas sehingga menghambat dalam mencapai target kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. Salah satu di antaranya adalah dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat Pemilihan Kepala Daerah serentak, sehingga terjadi pengurangan pagu anggaran. Hal ini berkaitan dengan mewujudkan misi ke 4 Bupati Mojokerto “Meningkatnya Infrastruktur sesuai kebutuhan di sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pelayanan public dan mendukung akses social, budaya dan pelestarian lingkungan”.

b. Kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2026 yang akan datang.

c. Rencana tindak lanjut

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. RACHMAT SUHARYONO
Pembina Utama Muda
NIP.19731120 199303 1 006

